



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 884/III/X/2015

RIEKE DIAH PITALOKA KETUA PANITIA ANGKET PELINDO II



**KEMUDAHAN INVESTASI
HARUS DIIRINGI
SINKRONISASI DAN
REGULASI**



**BELUM ADA
PAYUNG HUKUM
BELA NEGARA**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



RIEKE DIAH PITALOKA KETUA PANITIA ANGKET PELINDO II



Ketua Panitia Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan) dipercaya sebagai Ketua Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II. Rapat Intern panitia yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon langsung menyetujui usulan fraksi-fraksi dalam rapat tersebut.

Bersama Rieke ada tiga wakil ketua yang mendampinginya, yaitu Aziz Syamsuddin (F-PG), Desmon J Mahesa (F-Gerindra) dan Teguh Juwarno (F-PAN). Rencananya panitia ini akan bekerja selama 60 hari kerja. Dalam sambutan perdananya usai ditetapkan sebagai ketua, Rieke menyampaikan terima kasih atas kepercayaan semua fraksi dalam panitia angket tersebut. Ini akan menjadi langkah penting sebagai cermin kerja DPR RI.

“Ini tugas yang tidak mudah dan berat. Tetapi kami percaya anggota panitia angket punya kesepakatan bahwa persoalan di Pelindo ini harus bisa kita bongkar untuk mengembalikan bagaimana sesungguhnya BUMN

itu bekerja sebagai alat negara yang menyejahterakan rakyat. Bukan untuk kepentingan orang per orang,” ucapnya saat memimpin rapat perdana.

Sementara itu Teguh Juwarno dalam sambutannya sebagai Wakil Ketua, mengatakan, sekretariat Pansus akan segera menyusun agenda rapat ke depan. Anggota F-PAN ini juga berterima kasih atas kepercayaan para anggota panitia, terutama kepada Fraksi Demokrat yang merelakan satu kursi pimpinannya bagi PAN.

Disahkan Rapat Paripurna

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto didampingi Wakil-wakil Ketua Taufik Kurniawan dan Fadli Zon Selasa (13/10) mengesahkan susunan keanggotaan Panitia Angket Pelindo II. Kesepuluh Fraksi mengajukan namanya, namun fraksi Persatuan Pembangunan baru menyodorkan tiga

nama. Padahal jatahnya dua orang sehingga dikembalikan kepada Fraksi Persatuan Pembangunan.

Selengkapnya nama-nama anggota Panitia Angket Pelindo II dari Fraksi PDI Perjuangan adalah 6 anggota yakni Sukur H. Nababan, Rieke Diah Pitaloka, Herman Herry, Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, dan Andreas Susetyo.

Fraksi Partai Golkar mengajukan 5 anggota yaitu Bambang Susatyo, Adies Kadir, Budi Supriyanto, Kahar Muzakir dan Edison Betaubun.

Empat orang anggota dari Fraksi Gerindra yaitu Desmon Junaidi Mahesa, Muhnizar Zahro, Suisam dan Muhammad Heikal.

Tiga anggota dari FPD yakni Wahyu Sanjaya, I Putu Sudiartana dan Anton Sukartono Suratno.

Dari Fraksi PAN tiga anggota yaitu Daeng Muhammad, Teguh Juwarno dan Nasril Bahar.

Dua anggota dari FPKB yakni Nashim Khan dan Daniel Johan. Dua anggota dari FPKS yakni Abubakar Alhabsyi dan Refrizal.

Sementara FPP mengajukan tiga nama Eppiyardi Asda dan dua nama dikembalikan ke FPP dengan meminta seorang dari dua nama yaitu Arsul Sani dan atau Muhammad Iqbal.

Dua anggota dari Fraksi Partai Nasdem yaitu Taufikulhadi dan Erma Suryani dan satu nama anggota dari Fraksi Partai Hanura yaitu Nurdin Tampubolon.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengharapkan dengan disahkannya nama-nama anggota Panitia Angket Pelindo II maka bisa segera melaksanakan tugasnya. (MP, MH) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.I.P. M.H. (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Effendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.

pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

DPR DUKUNG RENOVASI MASJID AL-ITTIHAAD KEMANGGISAN



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membubuhkan tandatangan renovasi pembangunan Masjid Al-Ittihaad Komplek DPR RI Kemanggisan

DPR turut mendukung renovasi pembangunan Masjid Al-Ittihaad Komplek DPR RI Kemanggisan, Jakarta Barat. Pasalnya, masjid yang dibangun pada tahun 1976 itu, hingga kini belum mengalami proses renovasi. Padahal, kapasitas masjid sudah tidak seimbang lagi dengan kebutuhan saat ini.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, renovasi masjid merupakan salah satu kegiatan memakmurkan masjid, sehingga perlu didorong. Apalagi, renovasi juga sudah menjadi kebutuhan penghuni Kompleks DPR RI Kemanggisan untuk beribadah.

Demikian dikatakan Fahri, saat meresmikan renovasi pembangunan Masjid Al-Ittihaad Kompleks DPR RI Kemanggisan, Jakarta Barat, (Rabu (14/10/15)). Hadir juga dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti dan Walikota Jakarta Barat, Anas Efendi.

“Masjid ini harus lebih fungsional. Oleh karena itu renovasinya diharapkan dapat mencakup aspek yang lebih luas, sehingga usia keberadaan masjid ini bisa lebih panjang. Dan tentunya sepanjang kita ingin mendirikan negara kita, karena negara kita adalah negara yang serius ingin membangun sistem parlemen yang baik, sistem demokrasi yang kuat, sehingga masjid di Komplek DPR Kemanggisan sangat penting dihadirkan,” kata Fahri.

Politikus F-PKS ini menambahkan, dengan adanya masjid yang sesuai dengan kebutuhan penghuni Kompleks DPR RI Kemanggisan, sehingga penghuni akan lebih tenang dalam beribadah. Di satu sisi, ia menegaskan, fungsi masjid bukan

hanya untuk ibadah saja, tetapi juga untuk belajar agama. Masjid harus menjadi tempat untuk mengkonsolidasi kepribadian yang utuh.

“Masjid harus kembali menjadi tempat untuk tarbiyah. Tempat Pendidikan Agama yang di Masjid ini juga perlu dikembangkan. Saya mewakili DPR dan pribadi, mendukung upaya dan ikhtiar ini, sehingga akan menjadi penyempurnaan penguatan pegawai Sekretariat DPR RI di masa mendatang. Mudah-mudahan proses renovasi mendapatkan keberkahan, dan lancar,” harap politikus asal dapil NTB itu.

Dalam kesempatan yang sama, Winantuningtyastiti membenarkan bahwa Masjid Al-Ittihaad merupakan masjid yang dari awal pembangunan belum sempat di renovasi. Karena dibutuhkan kapasitas masjid yang lebih besar, tentu renovasi ini dirasa penting.

“Masjid Al-Ittihaad ini merupakan masjid yang paling tua di bangun di Kesetjengan DPR. Cukup tua, kompleks lain sudah dibangun, namun untuk Masjid Al-Ittihaad ini memang baru sekarang di renovasi,” kata Win, usai acara.

Win mengaku, pihaknya tentu mendorong untuk membantu upaya dari para pensiunan dan para penghuni Kompleks DPR RI Kemanggisan untuk mewujudkan rencana renovasi ini. Apalagi, Panitia Renovasi sudah mengantongi 50 persen dari total biaya yang dibutuhkan.

“Biasanya bantuan kita lebih individual. Ada kesadaran dari seluruh pegawai Setjen DPR untuk berkontribusi,” imbuh Win, sembari memastikan bahwa usai diresmikan ini, proses renovasi akan segera dimulai.

Sebelumnya, Ketua Panitia Renovasi masjid Al-Ittihaad, Suwardjo, melaporkan, diperkirakan untuk merenovasi masjid ini dibutuhkan biaya sebesar Rp2,88 miliar. Untuk membiayai renovasi ini, panitia sudah menghimpun dari masyarakat, jamaah, serta bantuan dari lembaga dan instansi yang telah dilakukan dari Juli 2014 hingga Oktober 2015 yang telah terkumpul sebesar Rp1,03 miliar.

“Untuk menyelesaikan biaya renovasi hingga selesai, Panitia masih kekurangan dana sebesar Rp1,85 miliar. Pelaksanaan renovasi akan dikerjakan secara swakelola, dengan berpegang prinsip efisiensi dan efektifitas,” jelas Suwardjo.

Acara diakhiri dengan pembubuhan tanda tangan oleh Fahri Hamzah di atas prasasti, sebagai tanda dimulainya renovasi masjid. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/HR

DPR DAN PEMERINTAH SEPAKAT TUNDA REVISI UU KPK

Pemerintah dan Pimpinan DPR akhirnya sepakat untuk menunda pengesahan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penundaan ini terjadi, setelah rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dengan Pimpinan DPR di Istana Merdeka pada Selasa (13/10) lalu.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, bahwa penundaan revisi UU KPK sudah sesuai yang dibicarakan antara Presiden dengan Pimpinan DPR.

“Baik Presiden maupun Pimpinan DPR ingin adanya penyempurnaan dalam revisi Undang-undang KPK tersebut, dan kita tidak ingin melemahkan KPK, namun untuk penguatan terhadap keberadaan KPK itu sendiri,” ujar Setya Novanto kepada wartawan di Gedung DPR Kamis (15/10/2015).

Setya Novanto menjelaskan, dengan adanya penundaan ini, keberadaan KPK, bisa bekerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian.



“Agenda di DPR sampai saat ini masih banyak, dimana pembahasan APBN 2016 masih berjalan dan harus segera diselesaikan, untuk itu waktunya kurang tepat untuk membahas revisi Undang-undang KPK ini,” tegas politisi Golkar ini.

Sebelumnya, kalangan anggota DPR mengusulkan agar Undang-undang KPK direvisi demi menunjang kinerja lembaga antirasuah ini. Namun usulan tersebut, banyak ditentang oleh berbagai pihak, termasuk dari Plt pimpinan KPK ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Pimpinan DPR dan Presiden mengadakan rapat konsultasi, dan menghasilkan kesimpulan untuk menunda revisi Undang-undang KPK. (AS), FOTO : NAEFURDJIE/PARLE/HR.

Ketua DPR RI Setya Novanto

DPR DAN DUBES AUSTRALIA BAHAS HUBUNGAN KEDUA NEGARA

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (13/10/15). Hubungan bilateral kedua negara menjadi perbincangan pokok saat pertemuan.

Dalam pertemuan ini, Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN); Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya (F-PG); Anggota Komisi I DPR, Kartika Yudhisti; Anggota Komisi IX DPR, Amelia Anggraini (F-Nasdem); dan Anggota Komisi XI Anna Mu'awanah (F-PKB).

“Ada beberapa hal yang menjadi perbincangan, karena kita dengan Australia adalah tetangga dekat. Kedekatan yang tidak terpisahkan ini, kita harapkan bisa terus menjadikan hubungan bilateral antar kedua Pemerintah yang semakin kuat,” kata Novanto, usai pertemuan.

Apalagi, tambah politikus F-PG itu, sudah cukup lama Indonesia dengan Australia sudah menandatangani Perjanjian Lombok atau Lombok Treaty. Perjanjian Lombok meliputi kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan dan keamanan pencegahan senjata pemusnah massal. Perjanjian ini juga mencakup kerjasama darurat, kerjasama dalam organisasi dunia tentang isu-isu keamanan dan kerjasama antar-masyarakat.

“Di dalam perjanjian itu tentunya sudah ada detail mengenai pelaksanaan-



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Dubes Australia

pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Indonesia dengan Australia. Jika ini dapat dilakukan dengan baik, tentu ini akan menjadi kekuatan bersama. Karena Indonesia dan Australia ini tidak terpisahkan,” imbuh Novanto.

Dalam kesempatan yang sama, juga dibahas mengenai kerjasama kedua negara, diantaranya kerjasama investasi dan pendidikan. Untuk pendidikan, kedua negara *concern* pada pemberian beasiswa.

“Ini menjadi kekuatan kita bersama, dan kita harapkan ke depan, kerjasama bilateral ini dapat kita tingkatkan, antara Pemerintah Indonesia maupun Australia,” imbuh Novanto.

Pembahasan juga menyinggung mengenai pengungsi yang berasal dari negara konflik. Novanto menginginkan Australia untuk tidak melakukan *push back*, atau pengembalian pengungsi ke Indonesia. Karena ini masalah kemanusiaan, yang tentunya perlu mendapat perhatian dari kedua negara.

“Dubes juga ingin membicarakan mengenai hal ini secara detail, tentu kita akan lakukan bersama-sama,” ujar politikus asal dapil NTT itu.

Sementara untuk kerjasama antar Parlemen, Novanto memastikan kerjasama akan terus ditingkatkan. (SF)

FOTO: DENUS/PARLE/RAY

PARLEMEN INDONESIA DUKUNG UNIFIKASI KOREA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Vice Chairman of Presidential Committee for Unification Preparation (PCUP) of the Republic of Korea YM. Dr. Chung Chong Wook di ruang kerjanya Gedung DPR, Selasa (13/10). Parlemen Republik Indonesia mendukung Unifikasi Korea.

Chung Chong Wook menerangkan proses terwujudnya Unifikasi Korea, pertama akan membawa suasana perdamaian terhadap semenanjung Korea, dan akan menciptakan untuk hidup bersama dalam kedua negara di Semenanjung Korea, setelah itu akan dimulai negosiasi tentang Pemerintahan membuat satu negara dalam Semenanjung Korea.

Sebagaimana diketahui ada peningkatan situasi persenjataan, namun setelah ada pertemuan antara pemimpin negara Korea Selatan dan Korea Utara, telah menimbulkan kemajuan menuju terwujudnya Unifikasi.

“Saya menganggap konsolidasi Korea penting untuk mendapatkan Unifikasi damai. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara kini sudah terjalin dengan baik,” ungkap Chung Chong Wook.

Anggota DPR RI Bobby Rizaldi (F-PG), mengatakan sangat terhormat bagi Indonesia dilibatkan proses Reunifikasi Korea, dan sangat mendukung penuh Pemerintah Indonesia turut serta proses reunifikasi Korea. Sebagai Anggota Parlemen Indonesia juga ingin turut berpartisipasi aktif untuk menurunkan tensi di perbatasan dengan cara menurunkan konflik seperti menghapus provokasi kedua negara.

“Dengan penurunan tensi kedua negara maka perundingan Unifikasi Korea akan berhasil,” katanya.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Vice Chairman of Presidential Committee for Unification Preparation (PCUP) of the Republic of Korea

Selain itu, Siti Mukaromah (F-PKB) mengatakan reunifikasi diharapkan akan mencapai kemajuan yang berarti. Untuk Korea Selatan dan Korea Utara yang sudah lama berpecah kita berharap penyatuan itu akan menjadi suatu kebersamaan yang dijadikan kekeluargaan buat Korea, sebab hal ini akan berdampak baik juga buat negara tetangga lainnya.

“Dengan semangat kebersamaan, Korea Selatan dan Korea Utara diharapkan menurunkan egonya masing-masing. Dari sisi humanisme sangat diperlukan hingga terbangunnya kebersamaan,” tuturnya. (ASI/FOTO:JAKA/PARLE/HR)

FADLI ZON SERAHKAN HASIL SIDANG GOPAC KE KPK



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan hasil Sidang GOPAC kepada Pimpinan KPK

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunjungi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/10/2015). Kedatangan Fadli Zon ke KPK dalam rangka menyampaikan hasil Sidang Umum Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) ke-6 di Yogyakarta baru-baru ini.

Kedatangan Fadli Zon sekaligus memperkenalkan posisi

barunya sebagai Presiden Conference Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) kepada KPK. Selain itu, dalam pertemuan Fadli Zon dengan KPK, diserahkan pula hasil Sidang Umum GOPAC berupa Deklarasi Yogyakarta.

“Hari ini, Pimpinan KPK 5 orang menerima kehadiran Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang baru saja terpilih di Jogja untuk menjadi Presiden GOPAC, atau gabungan parlemen-perlemen dunia yang bersama-sama memberantas korupsi. Kedatangan tersebut juga dalam rangka untuk konsultasi dengan KPK yang diakui sebagai *agency* anti korupsi yang memiliki reputasi yang tidak kecil,” terang Ketua KPK Taufiqurachman Ruki saat jumpa pers dengan wartawan seusia pertemuan.

“Kami bersama Anggota BKSAP Dadang Rusdiana, Wihadi Wiyanto, Amelia Anggraini, dan Moreno Soeprapto mewakili DPR yang aktif di GOPAC, menyampaikan Deklarasi Yogyakarta sebagai hasil dari Konferensi ke-6 GOPAC di Yogyakarta sebagai bentuk komitmen parlemen anti korupsi,” jelas Fadli Zon.

Kata Fadli, pihaknya juga meminta dukungan KPK agar

di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan GOPAC mendatang bisa bekerjasama, karena DPR akan membuat kantor satelit GOPAC di DPR sehingga diharapkan bisa bekerja sama dengan KPK.

Seperti diketahui, GOPAC adalah organisasi untuk anggota parlemen dari seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk pemberantasan korupsi terutama korupsi dengan kasus besar. Agenda utama GOPAC untuk mempromosikan peran parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi secara kolektif.

GOPAC juga berupaya membawa *grand corruption* untuk bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang bisa diadili di internasional.

Lembaga antikorupsi internasional ini didirikan 2002 sebagai hasil konferensi global di Ottawa, Kanada, yang dihadiri oleh 170 anggota parlemen dan 400 observer dari seluruh dunia. Fadli ditunjuk sebagai Presiden GOPAC usai Konferensi GOPAC ke-VI di Yogyakarta yang berlangsung 6-8 Oktober 2015 lalu.

Politisi Partai Gerindra ini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden GOPAC menggantikan Ricardo Garcia Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang *board meeting* yang dihadiri oleh 5 perwakilan benua dan regional *chapter* seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, Asia Selatan, Osenia Karibia, Amerika Utara. (SKR)/FOTO:ANDI M. ILHAM/PARLE/IW.

MAHASISWA INDONESIA HARUS CONFIDENCE



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima para calon mahasiswa S1 penerima beasiswa ke Prancis dan Jerman

Para mahasiswa Indonesia harus *confidence* (percaya diri) saat melanjutkan studi di luar negeri. Tak perlu takut dan minder berada di tengah para civitas akademika dari negara-negara asing lainnya. Inilah yang harus ditunjukkan para mahasiswa Indonesia terhadap bangsa-bangsa lain.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menerima para calon mahasiswa S1 penerima beasiswa ke Prancis dan Jerman di Option Room DPR, Kamis (8/10). Fahri mengingatkan agar para pelajar SMA yang kini mendapat beasiswa S1 ke negara-negara maju, tak perlu takut bergaul di tengah komunitas pelajar internasional.

Ada tiga hal penting yang diingatkan Fahri kepada para

calon mahasiswa penerima beasiswa ini. Pertama, percaya diri bahwa semua manusia tercipta sama. Yang membedakan, katanya, adalah pergaulan dan pendidikannya. Ini merupakan doktrin yang harus dipegang oleh para calon mahasiswa Indonesia yang ingin belajar ke luar negeri. Kedua, menjaga kesehatan. "Kalau bisa jangan merokok dan mengonsumsi minuman keras," imbuhnya.

Ketiga, lanjut Fahri, para mahasiswa Indonesia juga harus menjaga refleksi sebagai insan bertuhan. Dengan begitu terjaga keseimbangan hidup saat berada di negara asing. "Semua anak Indonesia yang lahir punya hak sama. Untuk itu, gantungkanlah cita-cita setinggi langit," nasihatnya di hadapan para calon mahasiswa.

Para pelajar yang menerima beasiswa studi S1 ini dikoordinasikan oleh lembaga konsultan pendidikan Euro Management yang dipimpin Bimo Sasongko, mantan penerima beasiswa ke Jerman di era BJ. Habibie. Ada seratus lulusan SMA yang segera diberangkatkan ke Prancis dan Jerman oleh Euro Management. Kebanyakan mengambil studi teknik, baik kedokteran maupun aeronatika.

Bimo sendiri mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya memfasilitasi para penerima beasiswa ke sembilan negara maju sebagai tujuan studi, diantaranya Inggris, Amerika, Australia, dan Belanda. Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Korea dalam pengiriman pelajar ke luar negeri. Program beasiswa ini kelak akan mempengaruhi kemajuan bangsa di masa depan. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan DPR untuk mempermudah para pelajar berprestasi belajar di luar negeri. (MH)/FOTO:NAEFUODJI/PARLE/HR

FADLI ZON DUKUNG PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WANITA INDONESIA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon beraudiensi dengan Delegasi Wanita Tani yang terhimpun dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dipimpin Ketuanya Ony Jafar. Maksud kedatangannya mengundang kehadiran Pimpinan Dewan pada Munas HKTI yang dilakukan pada awal November.

Dalam acara di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Lantai III Gedung DPR Senayan, Jumat (9/10), Ony Jafar juga meminta dukungan pengembangan produksi olahan

mie dari bahan baku singkong. Pihaknya menyatakan sudah sering mengirim surat kepada Kementerian Pertanian untuk mendorong hal ini, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. "Kami berharap Pak Fadli dapat membantu dalam hal ini," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi hal itu dengan mengapresiasi organisasi Wanita Tani yang sangat aktif membantu petani terhadap kegiatan pasca panen. Salah



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Delegasi Wanita Tani

satunya membuat mie berbahan baku dari singkong, sagu, serta umbi-umbian lainnya. Menurutnya kegiatan ini dapat menjadi alternatif masyarakat, karena pada umumnya mie terbuat dari gandum.

HKTI, kata Fadli, juga sering mengadakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat, khususnya para petani yang bertujuan mensejahterahkan kehidupannya. Meski demikian, ia sangat menyayangkan produksi pembuatan mie dari bahan baku singkong tersebut belum direspon positif oleh Kementerian Pertanian.

Politisi Partai Gerindra ini langsung merespon dan segera akan menghubungi Kementerian terkait sehingga upaya inovasi dan kreatifitas masyarakat meningkatkan kesejahteraan harus didukung pemerintah. (JK,MP), FOTO : ANDI M. ILHAM/PARLE/HR.

DPR SAHKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANSUS RUU MINOL

Rapat Paripurna DPR mengesahkan susunan dan keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol). Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto itu, disepakati nama-nama Anggota Pansus dari 10 fraksi DPR.

Fraksi PDI Perjuangan mengirimkan anggotanya, yakni Hendrawan Supratikno, I Gusti Agung Rai Wijaya, Samsu Niang, Jalaludin Rakhmat, Ketut Sustiawan, dan Ihsan Yunus. Kemudian, Fraksi Partai Golkar diwakili Saiful Bahri Ruray, Daniel Mutaqien Syafiuddin, Lili Asjudiredja, Noor Achmad, dan Sarmuji.

Aryo PS Djojohadikusumo, Muhammad Syafi'i, Sri Meliyana, dan Fadhlullah mewakili F-Gerindra. F-Demokrat mengirimkan anggotanya, Siti Mufattahah, Amin Santono, dan Syamsul Luthfi. Berikutnya, Muslim Ayub, Sungkono, dan Kuswiyanto dari F-PAN.

F-PKB diwakili Siti Masrifah dan Siti Mukaromah. Tifatul Sembiring dan Abdul Fikri dari F-PKS. Dari F-PPP yakni Mu-



Pimpinan DPR RI pada Sidang Paripurna

hammad Arwani Thomafi dan Achmad Mustaqim. F-Nasdem mengirimkan Yayuk Srirahayuningsih dan Zulfan Lindan. Dan yang terakhir, F-Hanura diwakili Lalu Gede Syamsul Mujahidin.

"Dengan disetujuinya susunan dan keanggotaan Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol ini, maka Pansus dapat memulai kegiatannya," kata Agus, di Gedung Nusantara II, Selasa (13/10/15). Agus kala itu didampingi para Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon. (SF) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

RUU PERLINDUNGAN TKI DITETAPKAN SEBAGAI RUU USUL INISIATIF DPR

Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (13/10/2015) dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (RUU Perlindungan TKI) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR.

"Apakah setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR," kata Agus di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta.

Seluruh anggota DPR yang hadir

dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan persetujuannya. "Setuju". Kemudian Agus mengetokkan palunya tiga kali. Tok, tok, tok.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi dalam laporannya yang tidak dibacakan dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa semangat revisi UU Nomor 39 Tahun

2004 atau RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sepenuhnya diarahkan pada upaya pemberian perlindungan yang komprehensif dengan menghadirkan dan meningkatkan peran dan tanggungjawab negara dan mengurangi peran swasta di seluruh sistem penempatan mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga pasca penempatan.

Selain itu, kata Dede, RUU ini untuk memberikan pembagian tugas yang jelas antar instansi mulai dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat, kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (BNP2TKI).



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Menurutnya, perlindungan negara dalam RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diberikan melalui beberapa kemudahan dan keringanan pembiayaan, seperti pemberian pen-

didikan dan pelatihan secara gratis di seluruh BLK dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan milik pemerintah, biaya paspor dan premi asuransi pekerja yang ditanggung negara dan pelaksanaan sistem asuransi yang langsung dipegang oleh negara melalui BPJS.

Dede menegaskan, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri juga mempertegas sanksi pidana bukan saja kepada pihak swasta, namun juga kepada pekerja dan pejabat negara yang melanggar ketentuan UU.

Selain mengesahkan RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri itu, disaat bersamaan, RUU Jasa Kontruksi juga disahkan menjadi RUU Usul inisiatif DPR. (SC), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/IW



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPR yang didampingi Wakil-wakil Ketua Taufik Kuriniawan dan Fadli Zon Selasa (13/10) mengesahkan susunan keanggotaan Panitia Angket Pelindo II. Kesepuluh Fraksi mengajukan nama-namanya, namun fraksi Persatuan Pembangunan menyodorkan tiga nama. Padahal jatahnya dua orang sehingga dikembalikan kepada Fraksi Persatuan Pembangunan.

Selengkapnya nama-nama anggota Panitia Angket Pelindo II dari Fraksi PDI Perjuangan adalah 6 anggota yakni Sukur H. Nababan, Rieke Diah Pitaloka, Herman Herry, Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, dan Andreas Susetyo.

Fraksi Partai Golkar mengajukan 5 anggota yaitu Bambang

DPR Sahkan Susunan Nama Anggota Panitia Angket Pelindo II

Susatyo, Adies Kadir, Budi Supriyanto, Kahar Muzakir dan Edison Betaubun.

Empat orang anggota dari Fraksi Gerindra yaitu Desmon Junaidi Mahesa, Muhnizar Zahro, Suirsam dan Muhammad Heikal.

Tiga anggota dari FPD yakni Wahyu Sanjaya, I Putu Sudiartana dan Anton Sukartono Suratno.

Dari Fraksi PAN tiga anggota yaitu Daeng Muhammad, Teguh Juwarno dan Nasril Bahar.

Dua anggota dari FPKB yakni Nashim Khan dan Daniel Johan. Dua anggota dari FPKS yakni Abubakar Alhabsyi dan Refrizal.

Sementara FPP mengajukan tiga nama Eppiyardi Asda dan dua nama dikembalikan ke FPP dengan meminta seorang dari dua nama yaitu Arsul Sani dan atau Muhammad Iqbal.

Dua anggota dari Fraksi Partai Nasdem yaitu Taufikulhadi dan Erma Suryani dan satu nama anggota dari Fraksi Partai Hanura yaitu Nurdin Tampubolon.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengharapkan dengan disahkannya nama-nama anggota Panitia Angket Pelindo II maka bisa segera melaksanakan tugasnya. (MPI)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

SANKSI DIKEBIRI DIMUNGKINKAN TAPI HARUS DENGAN TAHAPAN TERUKUR

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim menyatakan, usulan perlunya sanksi berat berupa pengebirian

bagi pelaku kejahatan seksual, terlalu jauh. Karena meski hukuman seperti ini dimungkinkan tetapi harus dengan

tahapan-tahapan terukur. "Jangan sampai kita memberi hukuman, tetapi di saat yang sama melanggar hak asasi orang lain," tukasnya kepada pers di ruang kerjanya, Kamis (15/10) di Senayan, Jakarta.

Hal itu dikatakan Mustaqim menanggapi pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang merasa geram dengan maraknya kasus keja-

hatan seksual terhadap anak-anak, sehingga mengusulkan supaya hasrat sex atau libido pelaku dikediri.

Seperti penerapan hukuman mati, kata politisi PPP ini, mempunyai ukuran-ukuran. Karena itu usulan vertilisasi saat ini belum pada porsinya, kecuali ada situasi yang sangat akut, kemudian tetap hukuman dalam posisi terukur.

Kalau merujuk anak-anak sebagai obyek, maka bicaranya pelaku kekerasan adalah orang dewasa sehingga pendekatannya adalah hukum pidana umum. Tetapi kalau pelakunya anak-anak, maka tidak bisa. Pada kejadian sekarang ada anak SD berhubungan badan, pertanyaannya benarkah anak ada kesadaran setinggi itu atau karena terpengaruh tontonan dan keluarganya membiarkan. "Ini kan tidak bisa hukum kebiri, jelas tidak masuk akal," tegasnya.

Karena itu, sambung dia, solusi terbaik adalah harus kembali ke norma-norma kehidupan kita sendiri yang selama ini sehingga pendidikan paling dini adalah di rumah. Pendidikan dini



Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim

ini bisa ikut menghantarkan anak menjadi lebih baik.

"Saya tak yakin anak-anak menjadi subyek anak sendiri, juga tak yakin kalau anak-anak mempunyai kesadaran pada titik itu. Saya lebih yakin, anak terpengaruh oleh audio visual maupun berita umum tapi lebih banyak oleh media visual," katanya.

Sebagai salah satu anggota Panja Perlindungan Anak, menurut Mustaqim yang sempat beberapa kali RDP juga kunjungan ke daerah sehingga ada hal-

hal perlu dicermati berkaitan dengan meningkatnya kekerasan terhadap anak. Diantaranya, kondisi sosial budaya ada sebagian masyarakat desa mereka yang kekurangan secara fisik dianggap aib sehingga kurang perlindungannya.

Selain itu, ada sebagian masyarakat yang kurang terdidik yang kadang melihat anak seperti itu bisa dieksploitir sesuai nafsu dan kepentingannya. Contoh di Kepri, ada seorang guru wali murid yang menggagahi muridnya. "Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Belum lagi kondisi *human trafficking* khususnya anak-anak. Mengacu UU N0.34/2014 berkaitan perlindungan anak adalah yang dimaksud adalah 18 tahun. Padahal contoh *human trafficking* anak-anak Jabar dikirim ke Batam arahnya *human trafficking* dan seks komersial di bawah 18 tahun," katanya dengan menambahkan, pada tataran ini harus ada ketegasan, namun sangat kompleks karena ketegasan terhadap anak berbeda dengan dewasa. (MP), FOTO : NAEFURODJIE/PARLE/HR.

PEMERINTAH DIMINTA TERBITKAN PERPRES BENCANA NASIONAL ASAP

Komisi II menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Selasa (13/10/2015).

Dalam rapat tersebut, Komisi II mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang penetapan status dan tingkatan bencana kabut asap menjadi bencana nasional sesuai dengan amanat UU No. 24/2007. Butir tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang disepakati dalam raker Komisi II tersebut.

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy yang membacakan kesimpulan rapat menyebutkan, mendesak Pemerintah untuk menggerakkan seluruh sumber daya nasional untuk segera menanggulangi bencana asap. Bencana asap yang terjadi sekarang tidak akan bisa hanya ditangani oleh sumber daya yang ada di daerah saja.

Terkait penegakan hukum, Komisi II meminta kepada pemerintah menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan dengan sanksi administrasi seperti menghentikan kegiatan, membekukan atau mencabut izin perusahaan tersebut.

"Beri penegakan hukum pidana maupun perdata sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan," ungkapnya.



Suasana Raker Komisi II dengan beberapa menteri

Komisi II juga menegaskan, Pemerintah dalam menyikapi bencana asap yang hingga saat ini masih berlangsung tidak hanya terfokus pada penanggulangan bencana tersebut. Tetapi harus mampu pula menyelesaikan akar permasalahan dari penyebab terjadinya bencana secara komprehensif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang termasuk membangun sistem informasi kebakaran hutan yang lebih baik.

Bagi para korban kabut asap, Komisi II meminta pemerintah untuk melakukan pemulihan korban bencana asap dan kerusakan lingkungan secara komprehensif. Pemerintah diminta untuk lebih mengoptimalkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten berkaitan dengan tanggung jawab menangani kebakaran hutan secara preventif. (SKR) FOTO: JAKA/PARLE/HR

KEMUDAHAN INVESTASI HARUS DIIRINGI SINKRONISASI DAN REGULASI

Setiap perijinan itu tidak hanya di pusat khususnya untuk investasi harus ada sinkronisasi dengan daerah. Banyak sekali persoalan antara peraturan pusat dan daerah itu kadang-kadang saling kontra produktif.

“Intinya semangat pemerintah itu harus diiringi evaluasi terhadap banyaknya hal yang mengganggu investasi karena hambatan regulasi,” kata anggota Komisi VI DPR Sungkono, Kamis (15/10)

Hal itu dikatakannya menanggapi salah satu paket kebijaksanaan pemerintah yang memberi kemudahan investasi. Mulai 26 Oktober 2015, investor bisa menikmati layanan izin investasi 3 jam di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.

Dalam 3 jam, investor bisa langsung mendapatkan izin prinsip investasi,



Anggota Komisi VI DPR Sungkono

akta pendirian usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan 3 persyaratan utama investasi. Waktu mengurus izin ini jauh lebih singkat, sebelumnya untuk mengurus izin prinsip saja butuh 3 hari kerja.

Sungkono berharap seiring kemudahan izin investasi maka ke depan be-

berapa hal perlu diperbaiki. Kalau tidak maka rencana menggenjot masuknya investasi asing tidak akan berhasil.

Selain persoalan regulasi, maka masalah SDM penting karena kalau tidak punya daya saing maka investor tidak akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Regulasi juga termasuk kepastian hukum, iklim investasi, kenyamanan baik keamanan seperti masyarakatnya diberi pemahaman pentingnya investasi bagi pembangunan bangsa ke depan.

Semua pihak berupaya melakukan pemahaman, jangan sampai keinginan peningkatan investasi hanya sepihak dari pemerintah saja, swasta, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan. “Jadi rasa nyaman harus diciptakan sehingga suasana kondusif investor akan memancing lebih banyak datang ke Indonesia,” tambah politisi PAN ini. (MP)/FOTO:NAEFURODJI/PARLE/IW.

Komisi I Selesaikan Legislasi Kerja Sama Masalah Pidana dengan Vietnam



Penandatanganan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Vietnam

Seluruh fraksi di Komisi I DPR menyampaikan kesepakatan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Vietnam

menjadi undang-undang. Produk legislasi ini melengkapi perjanjian ekstradisi yang sebelumnya telah disepakati.

“UU ini gunanya untuk mendukung upaya melakukan penyitaan aset, tukar

menukar informasi dan data terkait koruptor yang melarikan diri ke Vietnam. Kita sudah punya perjanjian ekstradisi, nah produk legislasi yang kita sahkan kali ini akan melengkapi,” kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/15).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional ini menambahkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara dua negara diharapkan dapat membantu menuntaskan masalah korupsi dalam skala besar yang menggerogoti bangsa.

“Kami punya analogi, dengan undang-undang ini ibaratnya liang tikus tempat persembunyian koruptor sudah berhasil kita buka, dan menarik koruptor yang bersembunyi di sana akan menjadi lebih mudah,” tekan dia.

Sementara itu bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Elnino Husen menyebutkan perjanjian kerja sama dalam bentuk undang-undang yang disahkan DPR, patut diperluas dengan negara lain.

“Jadi koruptor dari Indonesia tidak lagi punya semacam suaka atau tempat perlindungan di manapun,” tekan dia.

Pengambilan keputusan tingkat per-

tama dalam rapat pleno Komisi I turut dihadiri oleh Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan perwakilan Menteri Luar Negeri. Pengambilan

keputusan tingkat kedua akan dilakukan dalam rapat paripurna terdekat sehingga RUU ini sah menjadi keputusan DPR. (IKY) FOTO: NAEFURODJIE/PARLE/RAY

BUTUH INVESTASI JANGKA PENDEK UNTUK PERTAHANKAN RUPIAH

Dalam sepekan lalu, nilai tukar rupiah menguat tajam setelah berbulan-bulan mengalami keterpurukan. Nilai tukar rupiah Jumat lalu ditutup pada posisi 13.521, menguat 8.78 persen dibanding Jumat sebelumnya bertengger pada posisi 14.709 rupiah untuk setiap dolar AS. Tentu saja, fenomena itu membawa efek kejutan di tengah terus menguatnya dolar AS terhadap mata uang lain di dunia.

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo menilai penguatan nilai tukar itu disebabkan ketidakjelasan data ekonomi Amerika. Ketidakjelasan itu memantik asumsi kuat bahwa The Fed akan menunda kenaikan suku bunga sampai semester awal tahun depan.

“Kepastian ini yang membuat pengusaha mulai melepas dolarnya ke market, untuk melakukan kegiatan ekonomi yang selama ini mereka tahan (wait and see),” ujar legislator dari Dapil Jateng III ini, Selasa (13/10/2015), di Gedung DPR, Jakarta.

Seperti diketahui, kinerja ekonomi AS selama bulan September kemarin hanya menghasilkan 142 ribu lapangan kerja baru. Angka itu terhutang minim dibanding angka perkiraan yang menargetkan 220 ribu lapangan kerja. Dengan kondisi itu, muncul dugaan

kuat bahwa The Fed akan kembali menunda kenaikan suku bunga acuan hingga semester awal 2016.

Pria kelahiran Jombang ini juga menuturkan, tak hanya rupiah yang mengalami tren penguatan terhadap dolar. Fenomena serupa juga terjadi pada beberapa mata uang regional. Meskipun begitu, penguatan rupiah tergolong cukup tinggi dibanding mata uang negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, India, mau pun Korea dan Australia.

Tingginya penguatan rupiah dibanding mata uang negara-negara lain itu, menurut Donny juga dipengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif baik dibanding negara-negara di atas.

“Perlu diingat, walau pun pertumbuhan ekonomi Indonesia 4.5-4.7%, jika dibanding negara-negara tersebut, masih cukup tinggi. Inilah yang membuat para investor masuk ke Indonesia meski pun tidak serta merta menguatkan langsung secara signifikan,” ujarnya.

Dia melihat paket kebijakan ekonomi pemerintah belum berpengaruh banyak dalam penguatan nilai tukar rupiah kali ini. Dia memberikan contoh intervensi Bank Sentral sebesar delapan miliar



Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo

dolar AS guna menahan laju perlemahan rupiah yang ternyata belum cukup efektif menahan keterpurukan rupiah.

Dalam hematnya, paket kebijakan itu harus lebih efektif mengundang investasi ke dalam negeri, sehingga penguatan nilai tukar rupiah akan tetap bertahan dan semakin terasa dampaknya. Dalam hal ini, kita perlu lebih banyak valuta asing ke dalam negeri, yang keberadaannya bisa masuk melalui beberapa pintu.

“Di antaranya investasi baru untuk jangka pendek, devisa dari hasil ekspor serta intervensi Bank Sentral,” tutur Donny. Dia berharap, investor akan tetap masuk ke Indonesia hingga tahun depan. (AS) FOTO: JAKA/PARLE/HR

RUU PENGAMPUNAN NASIONAL BISA JADI ARENA MONEY LAUNDRY

Munculnya RUU Pengampunan Nasional dalam pembahasan prolegnas prioritas 2015 mendapatkan reaksi keras Anggota Badan Legislasi DPR dari

Fraksi NasDem Luthfi A. Mutty. Sebab menurut dia, RUU ini akan berimplikasi pada imunitas para pengemplang pajak dan menjadi ajang *money laundry*.

Imunitas yang dimaksud Luthfi adalah para pengemplang pajak akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa apabila RUU ini resmi menjadi UU. “Negara akan mengampuni para penjahat pajak yang memarkirkan uang di luar negeri. Semangat ini yang kemudian akan memunculkan dampak negatif terhadap kepatuhan dari para wajib pajak yang kelak akan abaikan negara,” kata Luthfi A. Mutty, Selasa, (13/10/2015), di Gedung DPR RI.



Anggota Baleg DPR Luthfi A. Muty

Menurut penilaiannya, RUU Pengampunan ini akan memungkinkan korporasi atau perorangan yang akan membersihkan sejarah transaksi keuangannya melalui skema pengampunan pajak oleh negara.

Membaca draft RUU Pengampunan Nasional, dia menjelaskan, yang masuk dalam skema pengampunan pajak adalah seluruh usaha dalam rangka memperoleh kekayaan kecuali teroris, pelaku kejahatan narkoba, dan perdagangan manusia. Dari kandungan salah satu pasal dalam RUU Pengampunan Nasional tersebut, Luthfi melihat bahwa potensi pengampunan terhadap harta hasil korupsi pun tidak terelakan.

“Menurut saya RUU Pengampunan

Pajak tidak tepat, potensi *money laundry* sangat besar disitu” paparnya.

Luthfi juga menuding bahwa ada upaya membawa kepentingan para penjahat pajak dalam RUU Pengampunan yang dimaksud. Menurutnya, pengusulan RUU ini dilakukan oleh anggota DPR yang bahkan di komisinya jelas-jelas tidak mengurus teknis pajak.

Seharusnya, menurut Luthfi RUU Pengampunan Pajak diajukan oleh Pemerintah karena seluruh kegiatan pengumpulan pajak dan pembuatan basis data adalah kewenangan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Seharusnya yang mengajukan itu pemerintah bukan DPR, tapi ini sebaliknya. Kita lihat saja partai mana yang bernafsu mengajukan RUU ini. Ada kepentingan apa DPR mengajukan RUU Pengampunan Nasional?” gugat Luthfi.

Luthfi mengakui bahwa sektor pajak adalah sektor terlemah di Indonesia. Ia melihat indikasi salah urus dari hulu dan hilir sehingga pengemplang pajak bisa dengan mudah melakukan aksinya. Dari regulasi misalnya, ia melihat bahwa peraturan yang ada tidak lantas menertibkan para wajib pajak. Malah potensi penerimaan negara dari sektor pajak bisa menguap begitu saja. Di sisi lainnya, anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan III ini juga mengkriti-

tisi tentang peradilan pajak yang kebanyakan diisi oleh para pejabat internal pajak yang nyatanya menciptakan lingkaran korupsi baru.

“Regulasi tentang pajak sangat longgar bagi para pengemplang pajak, dan yang paling saya kritisi adalah peradilan pajak yang diisi oleh orang-orang pajak yang justru akan menciptakan *Gayus-Gayus* lainnya,” tegasnya.

Dalam penilaiannya pemerintah sampai saat ini belum maksimal dalam melakukan pengumpulan pajak. Selain itu, dia juga meragukan pemerintah bisa transparan dan akuntabel ketika pengampunan pajak itu diberlakukan kelak. Lebih jauh dia mengatakan apabila RUU Pengampunan ini jadi disahkan, maka pemerintah perlu membuka dan merilis daftar perusahaan dan individu yang menerima surat pengampunan nasional. Hal tersebut harus disertai dengan detail harta yang diampuni, sebagai upaya memelihara kepercayaan publik.

“Yang jadi pertanyaan adalah pemerintah mampu *gak* merilis semua (data yang menerima surat pengampunan) itu ke publik. Karena menurut saya transparansi dan akuntabilitas itu harus menjadi prioritas ketika RUU ini gol di DPR,” tutupnya. (AS) FOTO: RIZKA/PARLE/HR

PELAKSANAAN HAJI 2015 MASIH BANYAK PERMASALAHAN



Pimpinan Komisi VIII DPR saat memberikan keterangan pers

Pelaksanaan ibadah haji tahun ini 1436 H / 2015 M diwarnai sejumlah permasalahan baik di dalam negeri pada saat persiapan keberangkatan jemaah

haji maupun pada saat pelaksanaan di Arab Saudi. Hasil pengawasan DPR RI atas Penyelenggaraan ibadah haji permasalahan persiapan pelaksanaan ibadah

haji, antara lain rekrutmen petugas haji, dan keterlambatan visa. Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan haji, antara lain pemondokan, transportasi, konsumsi, kesehatan, *living cost*, perlindungan, dan manajemen.

Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah haji, bahwa ada tiga poin yang harus menjadi perhatian penyelenggara ibadah haji, yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.

“Untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji, Komisi VIII merekomendasikan agar Pemerintah RI melalui Kementerian Agama RI meningkatkan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi,” ungkap Saleh, saat konperensi pers hasil pengawasan Tim DPR RI atas Penyelenggaraan iba-

dah haji, Selasa (13/10/2015), di ruang wartawan DPR, Jakarta.

Selain itu, Kementerian Agama diminta wajib membuat peraturan dan pedoman yang jelas mengenai rekrutmen petugas haji berkompeten sehingga dapat lebih melayani jamaah haji.

Saleh Partaonan, juga menyampaikan bahwa dalam bidang legislasi, UU No.13 tahun 2008 mendesak untuk dilakukan pergantian. UU ini belum mampu

menjadi payung hukum yang memadai untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji yang optimal.

“Ketika perlindungan terhadap jamaah haji di Arab Saudi tidak optimal, UU ini belum memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, misalnya langkah-langkah diplomatik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Komisi VIII meminta kepada Pemerintah meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji, sesuai dengan amanat UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus segera dibentuk dan ditetapkan pengurus dan tata kelolanya. (ASI FOTO: ANDRI/PARLE/IW)

KOMISI VIII TERIMA ASPIRASI FORUM KOMUNIKASI GURU HONORER



Komisi VIII DPR menerima Forum Komunikasi Guru Honorer Indonesia

Sekarangnya 40 perwakilan Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Indonesia diterima oleh Komisi VIII untuk mengadukan berbagai permasalahan yang ada di madrasah. Dan setidaknya ratusan guru honorer dari FKGH Korwil Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung melakukan aksi damai di depan gedung DPR.

Perwakilan FKGH ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid. Dalam kesempatan ini, Sodik didampingi Anggota Komisi VIII DPR, Samsu Niang (F-PDI Perjuangan), Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), dan Maman Imanul Haq (F-PKB). Hadir pula jajaran pejabat Kementerian Agama, yang dipimpin oleh Dirjen Pendidikan Islam, Kamarudin Amin.

Perwakilan FKGH ini mengadukan permasalahan, diantaranya, tersendatnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan fungsional dan tunjangan profesi guru selama setahun terakhir oleh Kementerian Agama. Akibat tersendatnya penyaluran dana itu, membuat ribuan madrasah berada dalam kondisi kritis, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya kegiatan belajar mengajar.

Menanggapi hal ini, Sodik menilai adanya komunikasi yang kurang intens antara Pejabat Kementerian Agama dengan Forum Guru Honorer. Pasalnya, pokok permasalahan tersendatnya penyaluran ini diakibatkan oleh perubahan akun, yakni dari akun nomor 57 ke akun nomor 52. Dan hal ini belum dilakukan sosialisasi yang baik.

“Duduk perkaranya itu ada di perubahan akun. Kami berharap setelah FKGH ini bertemu dengan Dirjen Pendis, semoga mereka puas. Tapi tentunya tidak cukup dengan penjelasan saja, tapi harus ada realisasinya,” kata Sodik, usai pertemuan, di Gedung Nusantara II, Senin (12/10/15).

Politikus F-Gerindra ini menambahkan, padahal, untuk perubahan nomor akun itu sudah diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.

“Kita sekarang dorong Kemenag untuk tidak lagi beralasan bahwa perubahan akun itu, karena sudah ada faktor pendukungnya, agar nasib para guru honorer ini dituntaskan,” tegas Sodik.

Sodik menambahkan, sebelumnya, pihaknya sudah memfasilitasi antara Kemenag dan Kementerian Keuangan, dan akhirnya terbit Peraturan Menteri Keuangan yang menjembatani akun nomor 52 dan 57. Sodik memastikan, jika itu belum ada progresnya, Komisi VIII akan kembali memfasilitasi kedua kementerian itu.

“Tapi, hal ini harus selesai Oktober ini, karena sudah ada Permenkeu yang menjembatani akun nomor 52 dan 57. Kita akan terus pantau ini, apalagi hal ini terjadi di seluruh Indonesia,” janji politikus asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Dirjen Pendis Kemenag, Kamarudin Amin mengatakan, perubahan akun dari nomor 57 ke nomor 52 ini berimbas pada cara eksekusi anggaran. Jika menggunakan akun nomor 57, bantuan akan diberikan secara langsung kepada madrasah. Namun dengan perubahan akun ke nomor 52, mekanismenya menjadi berbeda.

“Ini sesuatu yang rumit dan *complicated*, ditengah kondisi kita takut untuk melanggar aturan. Kita harus eksekusi sesuatu yang baru. Di awal-awal sangat luar biasa *complicated*. Pencairan dana bos ini juga berkaitan dengan madrasah,” kata Kamarudin.

Sementara terkait masalah SK *inpassing*, Kamarudin mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dari tahun lalu. Pihaknya juga sudah melakukan pendataan identifikasi yang komprehensif secara nasional, dan penerbitan SK. Anggaran untuk *inpassing* ini sebesar Rp 1,3 triliun untuk seluruh Indonesia.

“Menteri Agama sudah bersurat langsung kepada Menkeu, terkait *inpassing* ini. Menag meminta Menkeu untuk memberikan anggaran untuk *inpassing* secara khusus, karena masalahnya sudah sangat luar biasa,” imbuh Kamarudin.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Yanyan Herdiyan mengatakan, pihaknya akan memonitor tindak lanjut dari aduan ini, dari Kemenag pusat hingga ke daerah. (SF), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

Kepri Berharap Proses Permohonan Paten Bisa Dipersingkat

Panitia khusus (Pansus) RUU Hak Paten yang diketuai Jhon Kennedy Aziz menerima masukan atau aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beserta jajarannya yang akan dimasukkan dalam DIM (daftar inventaris masalah) RUU Hak Paten.

“Tujuan kami datang ke Kepri adalah untuk mendapatkan masukan berbagai permasalahan yang terkait Hak Paten, atau istilahnya belanja masalah,” ujar Jhon saat pertemuan dengan Sekda Kepri, Robert dengan jajarannya, Senin (12/10).

Jhon menjelaskan Kepri sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi alam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lalu lintas perdagangan juga sangat tinggi. Dengan demikian Kepri sejatinya memiliki tingkat kedekatan dan kebutuhan akan adanya Undang-undang Hak Paten ini.

Terlebih lagi menurut Kepala divisi pelayanan dan hukum Kanwil Hukum dan HAM Kepri, Sartono sejauh ini permohonan Paten dari daerahnya masih sedikit. Karena selama ini Kanwil Hukum dan HAM Kepri hanya menerima permohonannya saja, sementara pemeriksaan dan keputusan pemberian Hak Paten ada pada Dirjen Hak Paten Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Hal itulah yang kemungkinan menyebabkan permohonan Paten di Kepri sangat rendah.

Oleh karena itu Sekda Kepri beserta jajarannya berharap agar proses permohonan Paten birokrasinya tidak terlalu



Ketua Pansus RUU Paten berdialog dengan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Sekda Kepri, dan jajarannya

panjang, artinya hal itu bisa dilakukan hanya pada tingkatan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di masing-masing daerah saja. Dengan cara demikian juga diharapkan dapat menekan biaya dalam permohonan Hak Paten.

Menanggapi hal itu Jhon Kennedy, yang didampingi oleh beberapa anggota Pansus berjanji akan menampung seluruh masukan dan membahasnya kembali bersama beberapa ahli untuk kemudian dimasukkan ke dalam RUU Hak Paten. (AYU),

FOTO : AYU/PARLE/HR.



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman

Komisi II dapat memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) Tahun 2015 di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau yang lebih dikenal dengan istilah calon tunggal. Untuk itu, Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Rancangan Peraturan KPU tentang Pasangan Calon Tunggal.

“Terhadap seluruh catatan yang disampaikan Komisi II DPR RI yang

KOMISI II MINTA KPU REVISI RANCANGAN PKPU

menyangkut muatan dan sistematika penulisan Rancangan PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon berupa definisi, serta pasal-pasal yang perlu dilakukan revisi, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk segera menindaklanjutinya,” kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman.

Hal ini disampaikan Rambe dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, sebagai kesimpulan rapat, Senin (12/10), di Gedung DPR.

Tiga poin penting kesimpulan rapat tersebut adalah, pertama, memperbaiki konsideran poin “mengingat” untuk menambahkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang belum dimasukkan dalam rancangan itu.

Kedua, meminta KPU melengkapi definisi beberapa ketentuan umum, seperti masalah pengertian pemilihan, masalah definisi debat, definisi

penundaan, definisi pendaftaran, definisi kampanye, definis berhalangan tetap, definisi hasil penelitian, definisi memenuhi syarat, hingga definisi sanksi pembatalan dalam rancangan tersebut.

Ketiga, meminta KPU dan Bawaslu menyusun PKPU dan Peraturan Bawaslu terkait paslon tunggal harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, mengatakan KPU mengikuti putusan MK dan merancang PKPU yang mengacu pada putusan MK tersebut dan aturan-aturan sebelumnya.

“Pada intinya mengacu pada putusan MK, PKPU ini untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan teknis mengenai Pilkada yang hanya memiliki satu pasangan calon yang belum terakomodir di dalam PKPU sebelumnya,” terang Husni.

Anggota KPU Ida Budhiati menambahkan, dalam rancangan PKPU ini, diatur mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan problematik dalam penyelenggaraan Pilkada calon tunggal tersebut, di

antaranya mengenai metode kampanye, saksi saat pemungutan suara, maupun pengajuan sengketa pemilihan.

Ida juga menjelaskan, mengenai desain surat suara, berbeda dengan surat suara yang lebih dari satu pasangan calon. "Surat suara untuk satu pasangan calon ini mencakup informasi nama dan foto pasangan calon tunggal dan elemen informasi apakah setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tersebut," terangnya.

"Metode pemberian suara untuk satu pasangan calon, dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju," imbuh Ida.

Ketua Bawaslu RI Muhammad memastikan Bawaslu mengikuti putusan MK dan juga segera menyiapkan aturan teknis untuk pengawasan penyelenggaraan Pilkada di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

"Mengacu pada PKPU ini, Bawaslu juga akan menyiapkan Peraturan Bawaslu

(Perbawaslu) yang akan menjadi pedoman bagi pengawas pemilihan dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada khususnya untuk daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon," kata Muhammad.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, posisi pemerintah secara keseluruhan memahami dan sependapat dengan apa yang disampaikan KPU. (AS), FOTO: RIZKA/PARLE/HR.

BELUM ADA PAYUNG HUKUM BELA NEGARA

Anggota Komisi I DPR Tubagus (TB) Hasanuddin mempertanyakan rencana Menhan Ryamizard Ryacudu yang akan merekrut 100 juta orang untuk pembinaan bela negara mulai tahun ini. Rencana merekrut 100 juta orang untuk mengikuti program bela negara tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang Indonesia miliki saat ini.

"Rasanya sulit (rekrut 100 juta orang mengikuti bela negara). Pertama, dilihat dari targetnya ini berarti 10 juta orang per tahun atau 833.000 orang per bulan. Jumlah ini sangat fantastis dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki oleh Badiklat (Badan Pendidikan dan Latihan) Kemhan yang hanya mampu menampung 600 orang saja," jelas TB Hasanuddin sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (13/10/2015).

Sedangkan, menyangkut anggaran, sampai saat ini, DPR bersama pemerintah belum pernah mendiskusikannya secara rinci berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih 100 juta orang tersebut. Terkait program bela negara ini, TB Hasanuddin menyatakan membutuhkan payung hukum berupa perundang-undangan guna membuat parameter yang jelas. Misalnya, kebijakan bela negara seperti apa, pelaksananya siapa, pelakunya siapa dan kategori umur berapa, sistem rekrut-



Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin

men seperti apa, sistem pelatihannya, kurikulumnya bagaimana.

"Peraturan-peraturan pendukungnya seperti perpres atau keppres juga masih belum jelas. Tanpa UU Bela Negara, dan tanpa aturan pendukungnya akan sulit untuk mewujudkan kebijakan dan upaya bela negara itu," jelasnya.

Kewajiban bela negara saat ini baru sebatas diatur di dalam UUD 1945. Pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Sementara, untuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dia-

tur dalam UU sendiri. Hal itu sesuai dengan bunyi ayat (5) pada pasal tersebut.

"Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (3) juga disebutkan ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. "Jadi sampai sekarang, kita belum memiliki UU Bela Negara," ungkapnya.

"Implementasi program bela negara jangan tergesa-gesa tanpa payung hukum, agar tidak menimbulkan salah tafsir," harapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan konsep bela negara baik dalam konteks menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Dia mencontohkan, ketika perang kemerdekaan kesadaran bela negara rakyat tinggi, sehingga siap mengangkat senjata, lalu setelah perang selesai rakyat kembali ke profesinya masing-masing.

"Bela negara saat ini, bukan semata dilatih menembak, makanya dibutuhkan undang-undang. Misal, ada bencana kan anda ikut membantu, itu kan harus ada kesadaran bela negara, selain itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran memiliki Indonesia dan menjaga Indonesia" terang dia. (SKRI)/FOTO: NAEFURODJI/PARLE/IW.

Masyarakat dan Pemda Jatim Dukung Revisi UU PPHI

Respon masyarakat maupun Pemerintah Daerah Jawa Timur dinilai sangat baik dengan kedatangan Komisi IX DPR yang sedang membahas perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Mereka sangat mendukung revisi UU terse-

but.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri menegaskan hal itu usai memimpin kunjungan kerja spesifik dan pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim dan jajarannya, Pengurus AP-INDO, Praktisi Hukum dan Akademisi di Gedung Binaloka

Adikarya Surabaya, Senin (12/10) siang.

Menurut Syamsul, mereka sangat merasakan dan mengalami bahwa Undang-Undang ini tidak efektif dan sangat merugikan buruh. APINDO sebagai wakil pengusaha juga merasa tidak keberatan dengan revisi UU tersebut.

Politisi FPG ini juga menegaskan bahwa revisi UU PPHI ini tetap ada catatan, bukan berarti untuk memperkuat buruh dan melemahkan posisi pengusaha. Tetapi mengusahakan untuk memperkuat sinergi antara buruh dengan dunia pengusaha sehingga hubungan industrial dapat berjalan dengan baik.

Dalam revisi UU PPHI dia mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Mereka berharap perlunya ada peradilan yang sederhana, murah, singkat, dan langsung inkrah, tidak bertele-tele sehingga tidak perlu melalui proses yang panjang seperti yang sudah berjalan selama ini.

Ditambahkan juga, bahwa hakim ad hoc yang ada di PPHI perlu segera dievaluasi agar para hakim membuat lebih jelas cara kerjanya. Begitu pula peranan negara harus diperkuat, karena selama ini sangat minim dan seolah-olah diperhadapkan antara buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan persoalannya tanpa keterlibatan pihak negara.

“Dalam revisi UU PPHI nanti posisi negara harus diperkuat sehingga persoalannya dapat segera diselesaikan,” tegas dia.

Masyarakat Jawa Timur lanjut Syamsul, meminta kepada Komisi IX DPR untuk melakukan revisi sekomprensif mungkin dan tidak asal mengubah. Tetapi harus dilakukan



Tim kunspek Komisi X DPR foto bersama Wakil Gubernur Jatim

secara menyeluruh sehingga efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kalangan buruh maupun di kalangan pengusaha itu sendiri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini menambahkan bahwa revisi UU ini akan diselesaikan secepat mungkin, karena UU ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun, namun faktanya tidak efektif. “Saya berharap, revisi UU ini secepatnya akan diselesaikan kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna menjadi RUU usul inisiatif DPR,” pungkas Syamsul. (SPY,MPI)/FOTO: SUPRY/PARLE/IW.

SETAHUN JOKOWI-JK, RAPOR KINERJA MASIH MERAH



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

Bulan ini sudah setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemban amanah untuk melakukan perbaikan ekonomi nasional sesuai janji saat kampanye. Berdasarkan sejumlah parameter pemerintahan yang didukung oleh Kabinet Kerja belum mampu menunjukkan kinerja sesuai Tri Sakti dan Nawa Cita. Bisa dikatakan rapor

pada tahun pertama didominasi angka merah.

“Rapor masih banyak merahnya, ekonomi terpuruk. Karenanya, ke depan, mesti ada evaluasi besar-besaran. Perlu ada langkah revolusioner yang konkrit dalam mewujudkan janji-janji kampanye tempo hari. Ini adalah peringatan serius bagi pemerintah untuk tidak banyak ‘main-main’. Harus serius. Jika tidak, maka kondisi sosial-politik bisa terdistorsi dan ujung-ujungnya bisa menuju kondisi yang *chaotic*,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Bagi wakil rakyat dari dapil Jawa Barat IV ini cara paling mudah untuk melakukan penilaian adalah seberapa berhasil pemerintahan Jokowi-Kalla merealisasikan APBN Perubahan 2015. Dalam waktu satu tahun ini, ekonomi nasional menunjukkan gejala pesimistik alias kendur. Ketahanan ekonomi nasional juga sedang dalam tahap kritis. Parameternya, pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang terus tertekan.

Dari data BPS, saat ini, ekonomi hanya tumbuh 4,67%. Dan ini adalah yang terburuk dalam 5 tahun terakhir.

Kedua, jumlah pengangguran yang meningkat. Sesuai data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 300 ribu orang atau naik sebesar 0,81 persen. Peningkatan pengangguran ini memperkuat indikasi bahwa ekonomi nasional sedang ‘sakit’. Buruknya kinerja ekonomi hingga triwulan III 2015 telah berimbas kepada bertambahnya jumlah pengangguran. Padahal, jumlah orang yang butuh pekerjaan terus bertambah 3 juta orang.

Ketiga, laju inflasi yang tertinggi se-ASEAN. Berdasarkan analisis IGI, misalnya, laju inflasi bergeser dari proyeksi yang ditetapkan sebesar 4,4 persen. Bulan Mei 2015, laju inflasi mencapai 7,15 persen atau naik sebesar 2,75 persen dari target pemerintah. Saat ini, inflasi Indonesia adalah yang tertinggi se-ASEAN sebesar 6,18%.

“Tidak hanya di daerah perkotaan, kenaikan inflasi juga di daerah pedesaan yang ditandai dengan naiknya



indeks seluruh kelompok konsumsi. Lebih jauh, kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi komponen tertinggi penyebab inflasi, di samping komponen lain seperti naiknya harga sembako; beras, bawang, dan daging. Gejala seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih banyak mendengar dan tidak terburu-nafsu membuat kebijakan, yang ujung-ujungnya, mengorbankan rakyat kecil. Bagi nelayan, misalnya, BBM menjadi komponen terbesar aktivitas produksi sehingga, begitu harga BBM dinaikkan, nilai tukar nelayan langsung anjlok,” tandas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Parameter keempat, Nilai Tukar Petani dan Nelayan yang anjlok. Kita semua tahu, petani dan nelayan adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap gejolak perekonomian nasional ini. Dampak dari buruknya ekonomi nasional telah menyebabkan anjloknya nilai tukar petani dan nelayan. Bahkan, peningkatan jumlah pengangguran 2015 pun disumbang dari tenaga kerja di sektor pertanian.

Begitu juga dengan nelayan. Dampak kenaikan BBM pada pertengahan menyebabkan anjloknya Nilai Tukar Nelayan hingga angka 102,97 yang merupakan angka terburuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS dan analisis IGJ, hingga kini NTN masih menunjukkan nilai yang fluktuatif. Komponen BBM menempati hingga 60-80 persen dari total biaya melaut. Selain itu, distribusi BBM yang tidak merata pun turut menjadi penyebabnya.

Parameter kelima, kinerja investasi. Hingga saat ini, realisasi investasi yang terbilang sangat minim dan hanya berkontribusi di bawah 2% pada pertumbuhan PDB. Selanjutnya, investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan

penyerapan tenaga kerja. Terbukti, dari data BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja sekitar 50 ribu orang pada triwulan yang lalu.

Parameter keenam, utang luar negeri yang membengkak. Sampai triwulan II-2015, Utang LN yang harus dibayar sudah membengkak di atas USD 300 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 134,6 miliar (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD 169,7 miliar (55,8% dari total ULN). Kalau dirupiahkan dengan asumsi 1 dolar = Rp 13.500 sama dengan Rp 4000 triliun. Itu besar sekali. Dua kali lipat dari APBN.

“Utang itulah yang terus menggerus cadangan devisa dan hasil ekspor yang sudah sangat kritis. Lebih-lebih kinerja ekspor pemerintah terus anjlok. Di saat yang sama, pemerintah terus membuka peluang impor. Terakhir, pemerintah membuka importasi beras dan gula jutaan ton,” papar dia.

Selanjutnya, paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi-Kalla yang baru-baru ini diterbitkan, tidak terlalu menyentuh persoalan mendasar. Malahan justru bisa jadi “blunder” bagi ketahanan ekonomi. Paket tahap 1 didominasi oleh deregulasi yang bertentangan dengan Trisaksi guna mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi.

Pemerintah lewat Kemendag banyak merevisi regulasi yang selama ini memproteksi ekonomi nasional. Sebut saja, misalnya, revisi atas Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 yang menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor untuk mempermudah impor. Itu juga sangat mengancam usaha untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai proyek infrastruktur.

Berikutnya, paket ekonomi tahap 2

terkait investasi. Kebijakan itu belum menyentuh 2 masalah pokok. Pertama, jaminan terhadap penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari masuknya investasi. Karenanya, saya berharap pemberian kemudahan layanan, pemberian *tax allowance* dan *tax holiday*, serta pemberian berbagai insentif itu harus selektif.

Persoalan pokok berikut, lemahnya pengawasan dari BKPM atas penerapan berbagai paket kebijakan mempermudah investasi. Selama ini, aspek pengawasan atas kebijakan investasi di Indonesia tidak menyeluruh. Biasanya di awalnya bagus, tapi bisa terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, investor banyak mengeluh di lapangan. Ini penting digarisbawahi, dan karenanya diperlukan penegakan hukum yang kuat dan tuntas.

Terakhir, terkait paket ekonomi tahap tiga yang tidak konkret dan tumpang tindih serta tidak berefek pada peningkatan daya saing. Sebagai contoh, pemerintah ingin dorong ekspor, tapi di saat yang sama, membuat deregulasi besar-besaran yang membuka peluang impor yang besar. Lalu, pemerintah ingin mencegah PHK, tapi di saat yang sama, mencabut proteksi-proteksi non-tarif yang menyulitkan tumbuhnya UKM. Ujungnya, arah kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih itu membuat pelaku usaha bingung.

Pada bagian akhir ia memberi catatan khusus pada presiden. “Ideal normatif minimal seorang presiden sebagai pemimpin negara, merupakan kombinasi dari leader dan manager. Bila seorang presiden tidak memiliki kemampuan itu, maka dapat dipastikan presiden tersebut adalah pemimpin yang ‘dipaksakan’ untuk kepentingan politik praktis sesaat yang menyesatkan dan merugikan banyak pihak termasuk negara bangsanya,” demikian Heri. (IKY)

FOTO: ANDRI/PARLE/RAY

KKIP DIMINTA SERIUS CARI SOLUSI MAJUKAN INDUSTRI PERTAHANAN

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI diharapkan dapat mencari solusi yang sistemik, untuk memajukan industri pertahanan nasional. Ketua Komisi I mengatakan Presiden sebagai ketua KKIP harus fokus secara periodik duduk bersama KKIP untuk

menentukan progres report pengembangan industri pertahanan.

“Arahan presiden tentang industri pertahanan harus ditindaklanjuti oleh KKIP karena dia lintas sektoral yang di dalamnya ada Kemenhan, TNI, Polri, Kementerian Keuangan, BUMN, Kemen Perindustrian,” kata Mahfudz, baru-

baru ini di Gedung DPR RI.

Menurutnya, harus ada komitmen yang ditunjukkan pemerintah dari sisi kebijakan dan dukungan anggaran. Mahfudz mengutarakan ketika PT. PAL sudah siap dalam tranfer teknologi untuk bisa membangun kapal selam bersama project dengan Korea un-

tuk membangun kapal selam ke-3 di PT.PAL, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai negara akan memback up kebutuhan 2,5 Triliun dalam penyiapan infrastruktur kapal selam.

“Dalam situasi sekarang tidak mudah menggelontorkan 2,5 T, tetapi jika ini komitmen jangka panjang, semestinya dicarikan solusi. Hal yang sama juga dialami PT.Dirgantara Indonesia (DI), dan PT.Pindad,” paparnya.

Selanjutnya, berbicara industri pertahanan maka harus dilihat jejaring industri sampai kepada industri pendukungnya. Jangan sampai ketika ingin memajukan industri pertahanan, tetapi lini jejaring industrinya tidak terbangun dengan baik.

Hingga saat ini belum terlihat kebijakan dari Kementerian Perindustrian untuk memajukan industri alutsista yang harus juga mamajukan industri pendukungnya, sehingga dapat terpadu. Menurutnya keterpaduan sek-



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

tor industri yang mendukung industri alutsista juga harus disiapkan oleh Pemerintah.

Dalam konteks alutsista, Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) lebih sebagai *lex integrator* yang bisa saja platfomnya dibuat oleh *corporate* lain tetapi BUMNIP sebagi

lead integrator untuk mengubahnya sebagai alutsista.

“Sepanjang industri-industri pendukung tidak disiapkan, akhirnya nanti kita bisa membuat industri pertahanan dalam negeri tapi tidak lebih sebatas perakitan, komponennya diambil dari pihak lain. Ini yang harus kita hindari, karena kita ingin komponen lokal maksimal disiapkan dari dalam negeri,”katanya, seraya mencontohkan, industri baja, kalau industri bajanya tidak dikembangkan, akan kesulitan bahan baku.

Selain itu, kendala yang kini dihadapi oleh BUMN industri pertahanan, yaitu kendala financial, karena sistem penganggaran, maka diperlukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk peningkatan kapasitas infrastruktur produksi. “Industri pertahanan kita masih lemah dari sisi *financing*, sementara untuk mendapatkan *financing* dari perbankan tidak mudah bagi mereka,” imbuhnya (IAS), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

SETJEN GELAR WORKSHOP WEBSITE ANGGOTA DPR

Pada saat ini DPR RI telah berkomitmen mewujudkan parlemen modern dengan terus mendorong transformasi dan reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan ini didasarkan pada tiga prinsip yakni terwujudnya transparansi, penggunaan teknologi informasi dan representasi rakyat.

Melalui web resmi DPR RI (www.dpr.go.id) memberikan informasi kegiatan setiap anggota Dewan. Untuk itu, Bidang Data dan Sarana Informasi Pusat Pengkajian Pengelolaan data dan Informasi Setjen DPR RI mengadakan workshop web Anggota DPR RI.

Deputi bidang Persidangan Setjen DPR Damayanti mengatakan, digelarnya workshop adalah menindaklanjuti permintaan Pimpinan Dewan agar setiap Anggota Dewan mempunyai web pribadi yang berisi tentang kegiatan anggota DPR RI. Baik kegiatan dalam rapat di DPR maupun kegiatan di luar ruang rapat seperti kunjungan ke daerah pemilihan, serta tulisan opini anggota DPR RI.

“Workshop ini diharapkan agar tenaga ahli dapat melakukan *up dating* informasi yang ada dalam web anggota, sehingga informasi tentang anggota DPR RI kepada masyarakat luas dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, diharapkan masyarakat akan memahami tentang kegiatan dan tugas anggota DPR RI secara memadai,” kata Damayanti, saat membuka workshop web Anggota DPR RI, Senin (12/10/2015), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 81 menyatakan bahwa Anggota DPR RI mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi



Suasana workshop website yang diselenggarakan Setjen DPR RI

konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

“Bunyi dari pasal tersebut mengisyaratkan adanya peran dan tanggung jawab Anggota DPR RI kepada konstituen dalam melakukan komunikasi baik aktif maupun pasif kepada konstituennya,” kata Damayanti.

Komunikasi aktif artinya dengan menggali dan intensitas berkomunikasi dengan konstituen dalam mendapatkan masukan-masukan di daerah pemilihan, baik terkait aspirasi pembangunan, layanan pemerintah di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya serta kendala yang dialami.

Pada bagian lain, anggota DPR RI juga mempunyai kewajiban terhadap konstituen yang telah memilihnya. Tanggung jawab tersebut dapat dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan maupun pertemuan dengan konstituen.

Sementara itu Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Rahaju Setya Wardani menjelaskan,

perkembangan teknologi informasi atau internet telah meningkatkan permintaan untuk akses ke catatan parlemen proses dalam berbagai format, baik teks, audio, dan video. Anggota parlemen dan staf tenaga ahli, wartawan, dan masyarakat umum sekarang mengharapkan proses yang akan dibuat tersedia secara tepat waktu dan akurat.

Menurut dia, publikasi efisien dari proses parlemen *online*

telah menjadi patokan penting untuk mengevaluasi keterbukaan dan transparansi parlemen, serta alat untuk memungkinkan partisipasi dalam proses pembuatan hukum.

“Saya berharap workshop web anggota DPR RI dapat memberikan transparansi kinerja anggota DPR kepada masyarakat seperti yang diharapkan,” tegasnya. (AS), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/IW

PENDIDIKAN ISLAM JANGAN SELALU DIMARGINALKAN



Suasana RDP Komisi VIII DPR dengan Kakanwil Kemenag Sulteng dan jajarannya

Indonesia merupakan negara mayoritas Islam. Akan tetapi dalam hal pendidikan, Pendidikan Islam (Pendis) tidak menjadi mayoritas dalam kedudukan pendidikan nasional. Pendis di pandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai persoalan dan hambatan mencuat dalam penyelenggaraan Pendis tidak dapat dielakkan sebagai eksekusi dari implementasi kebijakan pendidikan nasional yang di desain oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto dari F-PAN saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Sulteng Zulkifli Tahir, di Kantor Kakanwil Kemenag Sulteng, baru-baru ini.

“Pendis ini hadir, pertama adalah targetnya untuk terbentuk *grand design* Pendidikan Indonesia. Kedua adalah, bagaimana setelah *grand design* ini ada tata kelola ini menjadi lebih baik. Ketiga adalah, kita akan menuntut keadilan

dari pemerintah pusat karena anggaran pendidikan yang di Kemendiknas itu jauh porsinya lebih besar daripada yang ada di Kemenag. Ini salah satu wujud ketidak-adilan,” tegas Kuswiyanto dengan bertekad akan mendorong Kemenag betul-betul mengelola pendidikan ini dengan baik.

Celakanya, lanjut politisi PAN ini, ketika reformasi bahwa agama ini menjadi urusan pemerintah pusat, tapi *kebablasan* sampai kepada pendidikan agama. Mestinya pendidikan agama itu ikut diotonomikan.

Diingatkan, tahun 2014 lalu Mendagri itu sudah mengeluarkan edaran bahwa hendaknya sekolah-sekolah madrasah dan sekolah lainnya mendapatkan perhatian. “Kalau surat Mendagri belum cukup, kita akan dorong kepada Presiden RI untuk membuat surat sehingga ini lebih kuat lagi. Ini yang akan kita perjuangkan kepada Presiden RI,” tukasnya.

Ia menyarankan kepada Asisten I Setdaprov Sulteng Arief Latjuba dan Kakanwil Kemenag Sulteng Zulkifli Tahir, bagaimana pemerintah kabupaten dan provinsi ini mendorong bahwa Tsanawiyah, Aliyah dan lain-lain itu untuk mendapatkan porsi pendanaan. Tahun 2013 anggaran Pendis itu kira-kira Rp45 Triliun, sekarang menjadi Rp46 Triliun.

“Saya punya keyakinan, Insya Allah Menteri Agama akan berjuang meningkatkan anggaran ini menjadi lebih besar, paling tidak ketika APBN-P, dibantu oleh Komisi VIII DPR,” tegasnya.

Ia menambahkan, tidak adil kalau sekolah di kalangan Kemenag ini selalu dimarginalkan dengan alasan dianggap belum otonomi. “Mudah-mudahan perjuangan Komisi VIII DPR RI akan berhasil. Namun perlu dukungan data yang konkret,” tutupnya. (IW)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

KOMISI VIII APRESIASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NTB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mochamad Hasbi Asidiki Jayabaya mengapresiasi pemberdayaan kaum perempuan terutama ibu rumah tangga di Provinsi NTB. Hal itu diungkapkannya di sela-sela kunjungannya ke NTB, Kamis (8\10).

“Saya datang ke NTB ini sebenarnya untuk menjangkau aspirasi terkait Panja Pendidikan Islam, namun karena masih ada waktu, tidak ada salahnya juga saya melihat bagaimana kondisi sosial perempuan di sini. Bidang itu juga masih di



Anggota Komisi VIII DPR Mochamad Hasbi Asidiki Jayabaya

bawah mitra kerja kami, komisi delapan,” ungkap Hasbi, begitu ia biasa disapa.

Ditambahkannya, usaha pemberdayaan perempuan terutama ibu rumah tangga disini dilihatnya lewat kegiatan-kegiatan yang ikut menopang perekonomian keluarga, seperti pengerajin tenun, yang konon merupakan keterampilan warisan turun temurun masyarakat setempat.

Meski demikian, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga kecewa. Ia mendapat informasi dari beberapa tenaga pengerajin tenun, penghasilannya per bulan hanya berkisar 500-600 ribu rupiah. Padahal satu kain tenun asli NTB nilai jualnya cukup tinggi. Sementara seorang penenun dalam

satu bulannya mampu menghasilkan kain minimal sebanyak 2-3 buah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi NTB khususnya dinas sosial dan kementerian pemberdayaan perempuan serta instansi terkait lainnya lebih memperhatikan hal ini dan meningkatkan penghasilan para pengrajin tenun. Hal itu semata untuk melestarika ketrampilan tenun sebagai budaya bangsa.

“Kalau penghasilan mereka terus rendah, bukan tidak mungkin mereka akan beralih profesi dan akhirnya tidak ada lagi yang bisa mewarisi budaya tenun asli Indonesia,” paparnya. (AYU), FOTO : AYU/PARLE/IW

Penyerapan Anggaran Kanwil Kemenag NTB Sangat Rendah

Panja Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI kecewa penyerapan anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih sangat rendah. Hal itu terungkap ketika Panja Pendis yang diketuai Saleh Partaonan Dauley mengunjungi provinsi ini pada Kamis (8/10).

“Terus terang kami sangat kecewa dengan pengakuan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana penyerapan per hari ini, 8 oktober masih tiga puluh persen. Padahal ini sudah penghujung tahun, masa anggaran tahun 2015 ini tinggal dua bulan lagi,” tegas Saleh.

Saleh menyayangkan anggaran Kemenag Provinsi NTB yang hanya sekitar Rp7 Miliar rupiah ini tidak dipergunakan dengan baik oleh jajaran Kemenag NTB. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan dengan anggaran itu yang tentunya dipergunakan untuk peningkatan kualitas keagamaan masyarakat NTB, khususnya dalam bidang pendidikan agama, baik Islam, Kristen maupun agama lainnya. Seperti peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren, dan lain sebagainya.

Pada kesempatan itu Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Sulaiman Hamid didampingi seluruh jajarannya mengungkapkan alasan lambannya penyerapan anggaran Kemenag di wilayahnya. Diantaranya seringnya revisi anggaran di tengah atau di akhir tahun sehingga menyebabkan terhambatnya waktu pelaksanaan anggaran.

Adanya kebijakan perubahan akun 57 tentang bantuan sosial, menjadi akun 52 (belanja barang) pada program BOS (bantuan operasional sekolah) dan bantuan rehabilitas gedung madrasah, Pondok pesantren juga dinilai Sulaiman menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran.



Komisi VIII DPR berfoto bersama Kanwil Kemenag NTB beserta jajarannya usai RDP

Selain itu, kebijakan verifikasi sasaran bantuan rehabilitasi pada DIPA Kanwil Kemenag Provinsi oleh Irjen Kemenag RI menjadi salah satu hambatan dalam proses eksekusi anggaran rehab, karena harus menunggu verifikasi dan rekomendasi dari Irjen.

“Sebenarnya semua itu tidak akan jadi hambatan jika semua bisa berkordinasi dengan baik, dan penggunaannya pun sesuai dengan tujuan atau peruntukannya,” jelas Saleh.

Menjawab hal itu Sulaiman mengatakan bahwa belakangan terbit PMK (peraturan menteri keuangan) 168 dimana Kementerian lembaga bisa mencairkan secara langsung seperti akun 57 (bansos) diharapkan akan mempercepat penyerapan sisa anggaran Kanwil Kemenag NTB yang sebesar 70 persen lagi.

Tidak hanya itu muncul peraturan baru dari Kemenag RI dimana daerah bisa memverifikasi sendiri program dan pelaksanaan Bansos tanpa terlebih dahulu harus menunggu rekomendasi dari Irjen Kemenag RI diyakininya akan mempercepat penyerapan Kemenag Provinsi NTB ini. (AYU) FOTO:

AYU/PARLE/IW

Kekurangan Guru Agama di Sulteng Belum Serius Ditangani

Problem pendidikan Islam di Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi tata kelola dan terkait anggaran perlu dicarikan jalan keluarnya. Sarana, prasarana, pembiayaan pendidikan dan kualitas madrasah serta pondok pesantren juga perlu dievaluasi sehingga terjadi perubahan.

“Kurangunya jumlah Guru Agama baik yang PNS maupun Honor belum mendapat perhatian serius, terutama kualifikasi dan kesejahteraan,” ungkap Deding Ishak dalam pertemuan Tim Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Sulteng diwakili Asisten



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak saat memimpin kunjungan ke Provinsi Sulteng

I Setdaprov.Sulteng Arief Latjuba, Kakanwil Kemenag Sulteng Zulkifli Tahir beserta jajarannya, di Kantor Kakanwil Kemenag Sulteng, Jum'at (09/10'2015).

Fakta menunjukkan bahwa sebagian madrasah terutama madrasah yang belum terakreditasi mengalami kesulitan untuk mewujudkan tata kelola administrasi modern yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, kata Deding.

Dalam konteks pendidikan, jelasnya, tata kelola administrasi yang baik dan akuntabel merupakan salah satu *necessary condition* dan pilar penting bagi upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah.

Selain itu, kata politisi Partai Golkar, saat ini wacana untuk menyatukan pengelolaan pendidikan Islam dibawah Kemendikbud mencuat kembali, dimana hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut mengenai dampaknya pada perkembangan

pendidikan Islam di Indonesia. "Wacana ini tidak sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003, bawah madrasah adalah satuan pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dibawah binaan Menteri Agama," tegasnya.

Lebih jauh, Deding menjelaskan bahwa permasalahan bantuan sosial (bansos) untuk madrasah terbentur dengan peraturan Kementerian Keuangan bahwa bansos tidak dilakukan melalui transfer tunai atau uang tapi menjadi belanja barang. "Masalah perubahan kebijakan bansos tersebut merupakan kendala yang menghambat dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam," pungkasnya.

Sementara Kakanwil Kemenag Sulteng, Zulkifli Tahir membenarkan bahwa posisi madrasah dan pondok pesantren yang sebagian besar merupakan lembaga swasta, sebagian besar tersebar hingga ke daerah pedesaan, bahkan di daerah terpencil menempatkan madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sangat berperan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin di daerah-daerah yang sulit terjangkau layanan pendidikan.

Satu hal lagi yang perlu menjadi catatan kata Zulkifli bahwa masih satu kabupaten di Sulteng (Kabupaten Sigi) yang belum memiliki madrasah negeri untuk semua jenjang.

Dia menambahkan dalam rangka mendukung optimalisasi percepatan pembangunan pendidikan agama dan keagamaan Islam, maka untuk tahun 2016 dibutuhkan tambahan dukungan anggaran untuk merehabilitas berbagai fasilitas dan prasarana pendidikan, harapnya. (IWI)/FOTO:IWAN

ARMANIAS/PARLE/IW.

Paket Kebijakan Ekonomi Diharapkan Sesuai Kebutuhan Riil



Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar

Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 3 beberapa waktu yang lalu. Sejumlah pihak berharap, paket kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekonomian yang kurang bersahabat. Harapan pun dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR, Willgo Zainar.

"Kita harapkan paket kebijakan ke 3 ini dapat menjawab, khususnya kepada

kebutuhan dan kepentingan sektor riil. Melambatnya perekonomian, sesungguhnya berdampak pada sektor riil. Industri banyak yang mati, gelombang PHK pun masih terus terjadi," analisa Willgo, ketika dihubungi Parlemenaria, Kamis (8/10).

Willgo berpendapat, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada dunia usaha, bisa berupa insentif pajak, bunga pinjaman, ataupun kredit. Sementara untuk kebijakan makronya, Pemerintah harus berani menurunkan harga BBM.

"Harga BBM telah menjadi satu hal yang mempengaruhi keseluruhan, seperti transportasi, logistik dan lainnya. Jika harga BBM turun, maka tarif dasar listrik juga bisa turun," jelas Willgo.

Politikus F-Gerindra juga berharap, paket ini berorientasi jangka pendek. Pasalnya, kondisi ekonomi saat ini sudah *injury time*. Indonesia yang saat ini sudah krisis finansial, tentunya tak mau terjebak dalam krisis ekonomi. Sehingga diharapkan paket ini dapat mengurangi beban masyarakat secara langsung.

"Pendapatan masyarakat yang turun,

otomatis daya beli juga turun. Jika daya beli masyarakat meningkat, ekonomi kembali bergerak. Industri bisa berproduksi, minimal untuk kebutuhan domestik," harap Willgo.

Politikus asal dapil NTB ini melanjutkan, jikalau paket ini belum bisa menguatkan nilai tukar rupiah, setidaknya dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Apalagi, intervensi dari Bank Indonesia juga belum maksimal dan optimal.

"Walaupun ekonomi regional dan global sedang melambat, yang penting ekonomi nasional kita bisa bergerak," yakin Willgo.

Di satu sisi, Willgo menilai, paket kebijakan ekonomi 1 dan 2 yang sudah diluncurkan Pemerintah sebelumnya belum dirasakan berdampak pada pasar. Bahkan, respon pasar cenderung negatif.

"Kenapa pasar tidak merespon positif, ini perlu dievaluasi pemerintah. apakah ini tatanan kebijakan pusat, namun tidak terimplementasi hingga ke daerah, ataukah bagaimana," saran Willgo. (SF)

FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR



Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

Komisi X DPR sepakat untuk menghapus Pasal Kretek dari Rancangan Undang-undang Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas. Mengingat, pasal ini cukup menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Kesepakatan penghapusan Pasal Kretek diambil dalam rapat internal Komisi X, Selasa (13/10/15).

Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra membenarkan hal itu saat dihubungi Parlemenaria melalui telepon, Kamis (15/10/15). Politikus yang akrab dipanggil SAH itu menyatakan, seluruh fraksi di Komisi X DPR sudah sepakat untuk menghapus pasal-pasal yang berhubungan dengan kretek.

“Dari hasil rapat internal Komisi X DPR, seluruh Fraksi melihat keberadaan Pasal Kretek di RUU Kebudayaan ini menjadi polemik. Untuk itu, Komisi X DPR sepakat menghapus Pasal Kretek,” kata SAH.

SAH melanjutkan, ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menilai, dengan adanya Pasal Kretek ini, seperti ingin membudayakan konsumsi kretek kepada anak-anak

KOMISI X SEPAKAT HAPUS PASAL KRETEK RUU KEBUDAYAAN

Sesuai dengan tupoksi DPR yang salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat, tentunya desakan dan protes dari masyarakat ini pun diakomodir.

“Jangan gara-gara Pasal Kretek ditolak masyarakat, RUU Kebudayaan menjadi tersendat pembahasannya. Apalagi, RUU ini sudah 35 tahun dibahas. Padahal, RUU Kebudayaan ini sangat dibutuhkan,” tegas politikus F-Gerindra itu.

Politikus asal dapil Jambi itu khawatir jika RUU Kebudayaan ini tidak segera disahkan, nantinya tidak ada payung hukum untuk melakukan pengamanan terhadap Kebudayaan Indonesia. Termasuk mendapatkan anggaran untuk pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

“Semua pasal berhubungan dengan Kretek sudah dihapus. Kami sangat mengakomodir aspirasi yang baik, dan kita harapkan RUU ini nantinya sesuai dengan seluruh pihak. Apalagi, saat ini juga DPR sedang menggodok RUU Pertembakauan, dikhawatirkan akan menjadi multitafsir,” imbuh SAH.

Hal senada pun diungkapkan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya (F-PD). Riefky menyatakan, dari hasil rapat internal Komisi X DPR, nantinya RUU yang akan diajukan sebagai inisiatif DPR ini tidak akan lagi mencantumkan istilah ‘kretek tradisional’.

“Bila dalam proses pembentukan RUU terdapat pasal yang menimbulkan resistensi publik yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru, maka

sebagai wakil rakyat sewajarnya kami mempertimbangkan kembali pencantuman pasal tersebut. Hal ini kami lakukan karena peraturan perundang-undangan memberi ruang kepada pengusul untuk dapat memperbaiki materi RUU,” kata politikus asal dapil Aceh itu.

Sebagaimana diketahui, ketentuan bahwa kretek masuk dalam sejarah dan warisan budaya tercantum dalam pasal 37 RUU Kebudayaan. Di pasal tersebut selain kretek, yang termasuk dalam sejarah dan warisan budaya adalah: bahasa dan aksara daerah; tradisi lisan; kepercayaan lokal; sejarah, arsip, naskah kuno, dan prasasti; cagar budaya; upacara tradisional; kesenian tradisional; kuliner tradisional; obat-obatan dan pengobatan tradisional; busana tradisional; kretek tradisional; olahraga tradisional; dan permainan tradisional.

Kemudian di bagian penjelasan, disebutkan secara lebih rinci mengenai pengertian kretek tradisional. “Yang dimaksud dengan ‘kretek tradisional’ adalah Produk Tembakau yang dibuat dari bahan baku yang ditanam di Indonesia berupa tembakau rajangan dan cengkeh atau rempah-rempah yang dibungkus dengan cara dilinting tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dan merupakan ciri khas Indonesia,” demikian bunyi bagian penjelasan dari Pasal Kretek RUU Kebudayaan tersebut. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW

ASPIRASI DAERAH HARUS DIAKOMODIR DALAM PENYUSUNAN UU

Badan Legislatif DPR memastikan, harus tercipta komunikasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Selain itu, aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU, harus diakomodir, sehingga terwujud Undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR, Totok Daryanto (F-PAN), saat mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Ketua DPRD, Kajati dan Perwakilan PANGDAN, Kapolda, Kanwil Hukum dan HAM, Civitas Akademika Universitas Diponegoro dan Universitas 17 Agustus 1945,

Organisasi profesi, LBH Dan LSM seluruh Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rabu (07/10/15).

“Penetapan prolegnas, terutama prolegnas prioritas tahun 2016, yang harus ditetapkan sebelum penetapan APBN pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan, sehingga kami harus menetapkan Prolegnas Prioritas pada waktu sebelum penetapan APBN yang waktunya ditentukan melalui Rapat Pimpinan Baleg untuk selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno Baleg,” kata Totok, politikus asal dapil Jawa Timur V itu.

Sementara itu, anggota Baleg DPR Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan) mengatakan, belum tercapainya realisasi penyelesaian RUU di DPR bukan semata-mata karena peran DPR saja, tetapi juga Pemerintah. ada beberapa RUU yang terkatung-katung lama tidak selesai, misalnya RUU Penyiaran.

“Penyelesaian satu RUU bukan hanya menjadi wilayah DPR RI saja, tetapi ada peran Pemerintah, sekitar 50 persen di dalam pembahasan RUU. Sering muncul salah persepsi seakan UU terkatung-katung, bahkan tidak selesai itu kesalahan DPR RI. Padahal sering sekali yang terjadi sebaliknya, pemerintah tidak bersedia untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atau sengaja memperlambat,” tegas politikus asal dapil Jawa Timur itu.

Penyerapan aspirasi ke Jawa Tengah ini mendapat apresiasi dari Wagub Jateng Heru Sudjatmono. Ia menyatakan, ini merupakan kesempatan baik yang diberikan kepada Pemprov untuk menyampaikan pikiran-pikiran, aspirasi-aspirasi atau masalah-masalah yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan,

“Saya berharap bisa memberikan partisipasi yang sebaik-baiknya. Ini suatu kehormatan dan bisa dijadikan kesempatan,” kata Wagub Jateng.

Dalam sesi diskusi, Ketua KPID Jateng memberikan masukan terkait peran penting KPID, mengingat akhlak dan budi pekerti bangsa yang semakin runtuh. Pasalnya, pembentuk watak selalu didasarkan kepada lembaga penyiaran, khususnya televisi.

“Dampak dari televisi ini sangat berpengaruh sekali, mempengaruhi segala aspek watak dan perilaku masyarakat kita,” kata Ketua KPID Jateng.

Ketua KPID Jateng menambahkan, saat ini wewenang KPID saat ini masih sangat minim, karena hanya dapat memberikan



Tim kunker Baleg DPR RI saat berdialog dengan Wakil Gubernur Jateng

sanksi dan teguran dari lembaga penyiaran, khususnya televisi. KPID tidak bisa berbuat banyak kalau lembaga penyiaran televisi itu melakukan pelanggaran atau kesalahan besar.

“Kita tidak bisa serta merta langsung mengeksekusi, kami berharap agar pada saat revisi itu nanti tetap mementingkan kepentingan publik, untuk mewujudkan penyiaran yang demokratis. Bukan wewenang regulator penyiaran baik KPI, KPID, maupun Kemenkominfo, ini perbedaannya harus jelas,” papar Ketua KPID Jateng.

Masukan berikutnya, terkait periodisasi KPID dan hubungan antara KPI dan KPID. Selama ini belum tercipta sinkronisasi kewenangan secara kelembagaan antara KPI dan KPID. (HR,SF), FOTO : EKA HINDRA/PARLE/HR.

RS TKG. FAKINAH BELUM LAYAK UNTUK JAMKESTAMA



Tim Kunker BURT DPR saat kunjungan ke RS Teungku Fakinah Banda Aceh

Rumah Sakit (RS) Teungku Fakinah di Banda Aceh dinilai belum layak untuk memenuhi standar layanan kesehatan VVIP bagi para anggota DPR RI dan pejabat lainnya. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang sedang menjajaki kerja sama dengan RS ini perlu meninjau ulang.

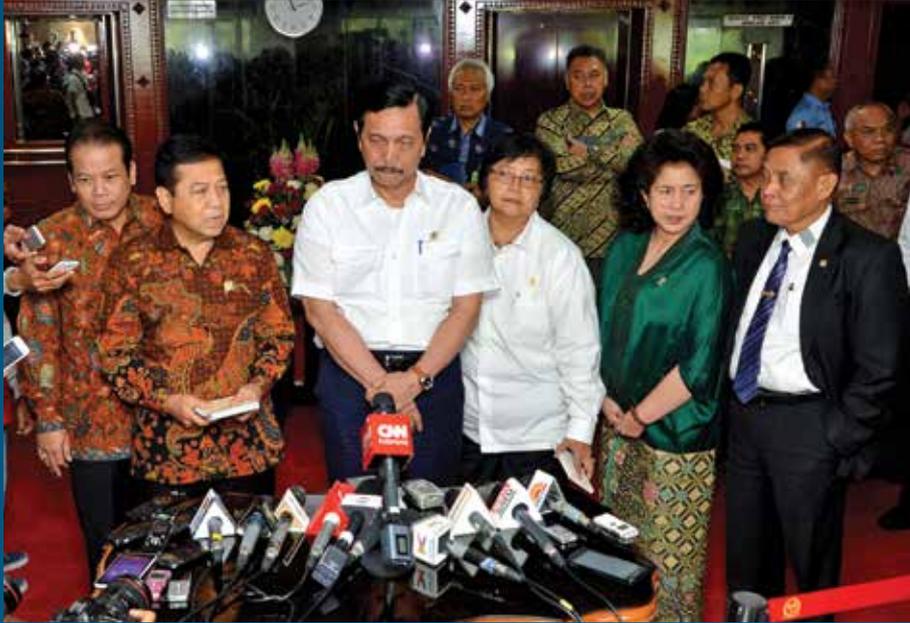
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Elva Hartati di Banda Aceh, Selasa (13/10). Fasilitas RS yang menyelenggarakan layanan VVIP harus betul-betul memadai. Sementara ketika tim kunjungan kerja BURT meninjau RS Tgk Fakinah, fasilitas dan layanan di RS ini belum memenuhi standar sesuai Jamkestama. Apalagi

RS tersebut masih bertipe C.

“RS ini untuk fasilitas anggota DPR RI dan keluarga belum memadai. Masih harus ada peningkatan, karena ruangnya masih berupa VIP. Sementara anggota DPR, kan, harus VVIP,” ungkap Elva, usai meninjau RS Tgk Fakinah bersama anggota BURT lainnya. Dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, ada Peraturan Presiden No.68/2014 yang mengatur layanan kesehatan bagi para pejabat negara dan keluarganya untuk mendapatkan layanan VVIP di beberapa RS tertentu yang menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi BUMN, dalam hal ini Jasindo.

Perpres tersebut diperkuat dengan Permenkes No.55/2014 dan Permenkeu No.16/2014 bahwa layanan untuk pejabat negara dan keluarganya harus sekelas VVIP baik di RS pemerintah maupun swasta. Sementara RS Tgk Fakinah belum memenuhi standar yang diamanatkan dalam peraturan tersebut. RS yang menjalin kerja sama dengan Jasindo, lanjut Elva, juga harus mampu merujuk ke RS pusat apabila anggota DPR dan keluarganya tak bisa ditanggulangi.

Ditambahkan Elva, Jasindo telah menjalin kerja sama dengan beberapa RS tertentu di seluruh Indonesia untuk memberi layanan kesehatan bagi para pejabat dan keluarganya. Dan Jasindo bisa mengirim usulan kepada pemerintah dan DPR untuk menjalin kerja sama dengan RS tertentu dalam menjalankan program Jamkestama ini. (MH) FOTO: SOFYAN/PARLE/HR



Pimpinan DPR rapat konsultasi dengan tiga Menteri membahas bencana asap yang belum reda dan meluas di Kalimantan dan Sumatera, Jumat (16/10)
Foto : Denus, Jaka/Parle/IW



Tim Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak meninjau Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palu, Jumat (09/10) Foto : Iwan Armanias/ Parle/IW



Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Dirut BPJS Kesehatan, Kamis (15/10), membahas Pengambilan Keputusan Penerimaan Negara dan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2016 dan BMN sebagai Underlying Asset SBSN, dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-700/M.06/2015. Foto : Jaka/ Parle/IW